



KPU Dijebak Bahas Audit BPK

Tak Ganggu Agenda Pilkada Serentak

JAKARTA-Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Komplek Parlemen, Senayan berlangsung alot. Sebab, agenda evaluasi Peraturan KPU (PKPU) dibelokkan menjadi penjelasan KPU soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan Rp 334 miliar. Pihak penyelenggara pemilu di Indonesia itu merasa dijebak oleh para anggota legislatif tersebut.

Pantauan *INDOPOS* di RDP itu, para komisioner tidak hanya dicecar sejumlah pertanyaan oleh para wakil rakyat terkait adanya indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 334 miliar dalam pelaksanaan pemilu 2013 dan 2014, tapi juga terjadi aksi protes untuk tidak melanjutkan agenda pertemuan dan membuat RDP diskors selama tiga jam.

"KPU mempertanyakan keabsahan undangan Komisi II DPR kepada KPU dan Bawaslu terkait agenda RDP hari ini (kemarin, 22/6, red). Dalam undangan, RDP hari ini hanya membahas evaluasi soal PKPU, bukan soal audit anggaran Pemilu oleh BPK, seperti yang disampaikan oleh ketua Komisi II DPR. Ini jebakan!," ungkap Husni Kamil Manik, Ketua KPU dalam RDP tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman membantahnya. Dia menyatakan, Komisi II DPR menggelar RDP dengan KPU dengan agenda utama rapat adalah mendengarkan penjelasan KPU soal hasil audit oleh BPK. "Pertama kita melakukan rapat ingin menyampaikan sejauh mana tindak lanjut KPU terhadap audit dari BPK, sekaligus kita sampaikan jumlahnya," ujarnya.

Dalam RDP ini, lanjut Rambe, KPU perlu menjelaskan alasan temuan BPK yang menyebut bahwa KPU diduga merugikan negara hingga Rp 334 miliar. "Yang dilakukan audit baru 34 persen dari

seluruh KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota. Dari ini saja sudah ditemui masalah yaitu, Rp 334 miliar. Bagaimana jika diaudit semua? Beberapa hari sudah ada penjelasan dari KPU katanya sudah 80 persen diselesaikan, ada juga yang menyebut 75 persen. Ada beda pendapat, makanya mau kita klarifikasi," tutur politisi Partai Golkar itu.

Anggota DPR, kata Rambe, hanya melakukan prosedur biasa fungsi pengawasan DPR bahwa hasil audit BPK harus dilaporkan kepada DPR dan DPD, yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh lembaga penegakan hukum. "Oleh karena itu kita nanti kesimpulannya tunggu saja, jelas harus ditindaklanjuti, bagaimana tahapannya. Kita juga sepakat pilkada serentak jalan terus. Komisi II sudah melakukan rapat, mengenai audit KPU akan kita tindak lanjuti," ucap Rambe.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, besarnya indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan BPK pada anggaran pemilu di KPU tahun 2013 dan 2014 berdampak besar terhadap penyelenggaraan pilkada serentak. "Tergantung audit. Bisa KPU diganti atau pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 ditunda," kata Taufik.

Apalagi, kata Taufik, ada peringatan dari BPK terkait rencana pelaksanaan pilkada serentak itu, seperti belum adanya anggaran untuk Bawaslu dan Kepolisian RI. Untuk itu hari ini (Senin, red) DPR pun mengadakan rapat dengan KPU untuk membahas temuan tersebut dalam waktu dekat.

"Saya berharap pelaksanaan pilkada serentak tidak perlu diundur. Namun, dengan adanya laporan BPK ini integritas KPU sebagai penyelenggara pilkada dipertanyakan," tukasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI lainnya, Lukman Edy menilai, pilkada serentak 2015 yang dijadwalkan 9 Desember mendatang tidak akan terganggu terkait temuan BPK soal ketidakpatuhan anggaran KPU. "Kami anggap ini tidak akan meng-

ganggu pilkada serentak. Temuan BPK sekarang belum sampai pada level yang mengganggu agenda politik," kata Lukman.

Lukman menegaskan pihaknya akan memberikan rekomendasi terkait penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum di KPU. "Apabila levelnya sudah sampai mengganggu agenda politik, baru kami tindaklanjuti. Kami harap ini tidak melebar ke persoalan politik," imbuhnya.

Di sisi lain, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko mengatakan, ada dua jenis pelanggaran yang mungkin dilakukan KPU terkait ketidakpatuhan anggaran tersebut. Pertama, bersifat administrasi. Kedua, bersifat hukum.

"Kalau bersifat hukum, maka itu tugas penegak hukum. Kalau sifatnya administrasi, maka kami sebagai Komisi II akan mengawasi itu," tandasnya. (aen)